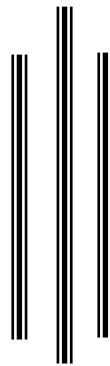


**LAPORAN LKJIP 2023**  
**KECAMATAN SUMBER HARTA**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS**



**OLEH**

**KECAMATAN SUMBER HARTA**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Penyusunan Laporan LKJIP Sumber Harta Tahun 2023 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan, Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Sumber Harta, maka disusunlah laporan LKJIP Kecamatan Sumber Harta sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas LKJIP Kecamatan Sumber Harta memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Maksud penyusunan laporan LKJIP Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas adalah memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya, untuk menentukan prioritas-prioritasdibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021–2026 dapat dicapai.



Demikian laporan LKJIP Kecamatan Sumber Harta Kab. Musi Rawas Tahun 2023 ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan kita.

Terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi aktifnya. Akhirnya semoga Allah memberkati kerja dan karya kita selalu.

SumberHarta....., Januari 2024

CAMAT SUMBER HARTA

DENI FERMADA LUBIS, S.P.I.M.SI

NIP.19850225 200903 1 006



## DAFTAR ISI

Halaman

**KATA PENGANTAR** .....

**DAFTAR ISI**.....

**DAFTAR TABEL** .....

**DAFTAR GAMBAR** .....

**IKHTISAR EKSEKUTIF** .....

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....

B. Gambaran Umum .....

C. Tugas dan Fungsi .....

D. Isu Strategis .....

E. Landasan Hukum.....

F. Sistematika.....

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

A. Rencana Strategis (RENSTRA).....

B. Indikator Kinerja Utama.....

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 .....

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....





3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah .....
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional .....
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja atau solusinya.....
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja...

B. Realisasi Anggaran.....

#### **BAB IV PENUTUP**

- A Kesimpulan .....
- B Langkah Kecamatan Sumber Harta Pada Masa Yang Akan Datang Dalam Mencapai Target Kinerja .....



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumber Harta Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Sumber Harta

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumber Harta Tahun 2023 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Kecamatan Sumber Harta menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Bupati.

---



Dengan dukungan dana APBD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp **2.355.308.250,-** Kantor Camat Sumber Harta pada Tahun Anggaran 2023 ini berusaha melaksanakan 5 Program yang terperinci menjadi 9 kegiatan dan 17 sub kegiatan, yang dimaksudkan dalam upaya pencapaian visi Kantor Camat Sumber Harta yaitu: “Terwujudnya ***Pelayanan Publik yang baik dan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Menuju Musi Rawas MANTAB*** Melalui evaluasi kinerja secara mandiri (*Self Assesment*), Kantor Camat Sumber Harta Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah mencapai sasaran dan target sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023 ini.

### **Rencana dan Realisasi Anggaran**

Dari anggaran yang disediakan melalui APBD Kabupaten Musi Rawas bagi OPD Kantor Camat Sumber Harta Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp **2.355.308.250,-** realisasi mencapai Rp. **2.185.001.551** atau sebesar 92,07% dari jumlah anggaran tersebut. Hal ini mencerminkan optimalisasi penyerapan dana yang tersedia bagi upaya peningkatan kinerja OPD. Dalam realisasinya Kantor Camat Sumber Harta Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berhasil melaksanakan 5 program secara keseluruhan, sehingga tercapai angka 92 % pelaksanaan secara keuangan pada tahun 2023





### **Kendala yang di hadapi**

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran adalah berasal dari internal dan eksternal kantor, meliputi sarana dan prasarana yang belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas pemanfaatannya serta koordinasi yang belum optimal antara Kantor Camat Sumber Harta dengan instansi terkait.

### **Pemecahan Masalah**

Mengatasi kendala tersebut di atas, pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa kegiatan di antaranya:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana melalui penambahan kuantitas dan kualitas pemanfaatannya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Kantor Camat Sumber Harta.

Sumber Harta, Februari 2024  
Camat Sumber Harta,

---

**DENI FERMADA LUBIS,S.PI.M.SI**

Penata TK I  
NIP. 19850225 200903 1 006

---

---

**BAB I**

## PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG

Dalam Rangka Penyelenggaraan good governance untuk meningkatkan Kinerja pelayanan Kecamatan Sumber Harta yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Berikut disampaikan tingkat capaian kinerja Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas berdasarkan sasaran/ target Renstra PD periode 2021-2026, menurut SPM untuk urusan wajib atau indikator kinerja pelayanan PD dan indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu tiga tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama tiga tahun kebelakang, maka dapat ditentukan trend yang akan terjadi tiga tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui trend yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk penyusunan penetapan Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan instansi pemerintah maupun organisasi perangkat Daerah Pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator *keluaran*.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama 3 tahun sebagaimana dijelaskan diatas didasari atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang baru memfasilitasi Kecamatan Sumber Harta dengan APBD terhitung sejak tahun 2008, dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumber Harta menggunakan analisis dari **output** yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut, dengan mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP)Kecamatan Sumber Harta tahun 2021 – 2026.

## **B.GAMBARAN UMUM**

Kecamatan Sumber Harta termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas dengan jarak  $\pm$  30 kilometer dari ibukota kabupaten. Luas wilayah Kecamatan Sumber Harta ialah  $\pm$  10.378,03 Ha, atau sekitar 0,55% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas, dengan jumlah desa/kelurahan yaitu sebanyak 9 desa 1 kelurahan. Batas-batas administrasi Kecamatan Sumber Harta adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kec. Megang Sakti
- Sebelah Selatan : Purwodadi
- Sebelah Timur : Kec. Purwodadi dan Megang Sakti;
- Sebelah Barat : Kec. Stl Ulu Terawas

Berikut adalah jarak tempuh desa/kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan Sumber harta:

### **Jarak Tempuh Desa/Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan**

Desa/Kelurahan	Jarak (Km)	Transportasi
1. Sumber Jaya	03	Darat

2.	Kel.Sumber Harta	01	Darat
3.	Suka Maju	04	Darat
4.	Sumber Asri	02	Darat
5.	Sumber Sari	06	Darat
6.	jambu Rejo	08	Darat
7.	Suka Mulya	07	Darat
8.	Suka jaya	10	Darat
9.	Suka Rami	12	Darat
10.	Madang	14	Darat

Sebagai OPD terdepan dalam memberikan pelayanan pemerintahan umum kepada masyarakat, terdapat banyak tantangan yang dihadapi Kecamatan Sumber Harta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam upaya pengembangan pelayanan Kecamatan Sumber Harta. Disamping tantangan yang merupakan faktor penghambat, juga terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayanan PD tersebut. Tantangan dan peluang tersebut merupakan dua sisi yang harus dikelola sedemikian rupa agar memberikan manfaat yang maksimal dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan sebagaimana dimaksud antara lain :

1. Karakteristik, kultur budaya dan agama serta norma yang berlaku dalam masyarakat beragam
2. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
3. Masih rendahnya taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat
4. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, transportasi dan infrastruktur dasar
5. Lemahnya koordinasi lintas sektor
6. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakin meningkat
7. Terbatasnya sumberdaya dan sumber dana
8. Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan

Selain tantangan tersebut di atas terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayan PD, peluang tersebut antara lain :

1. Kecamatan sudah menjadi PD
2. Dukungan dana APBD dan sumber lain yang dimungkinkan untuk digali
3. Sumberdaya alam yang cukup potensi
4. Kemajuan informasi dan teknologi
5. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

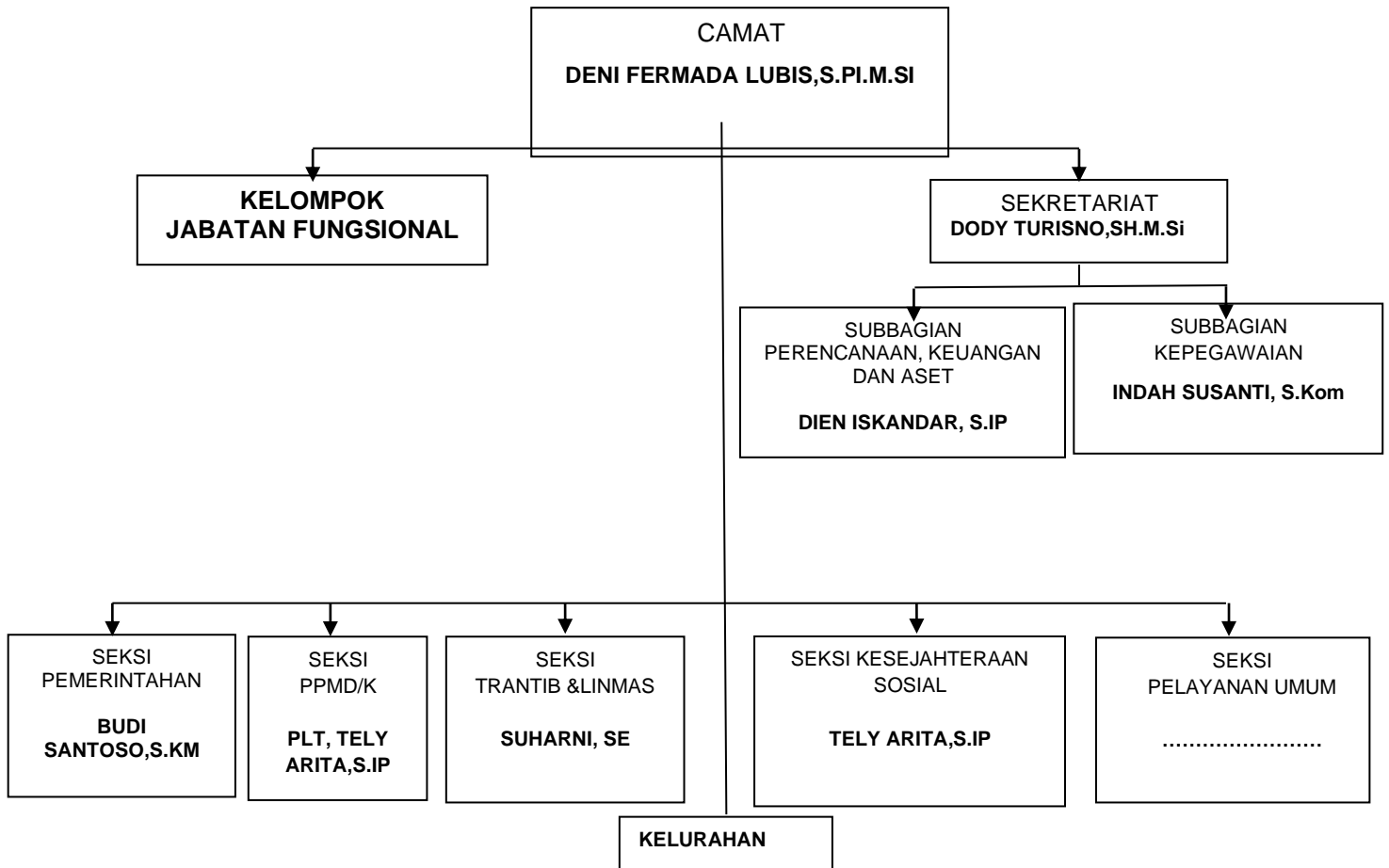
Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan Sumber Harta mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

**GAMBAR 1.1**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN SUMBER HARTA**



Adapun tugas setiap unit kerja/unit organisasi yang ada di Kecamatan Sumber Harta sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. **Camat**, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan

penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan 5 dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Dalam menjalankan tugas, Camat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan.

b. Penyusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan.

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.

i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.

j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.

k. Penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik Daerah/Negara, rumah tangga, dan penatausahaan Kecamatan.

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Kecamatan.

m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan Pelaksana tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

## **2.Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum,penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program anggaran kecamatan dan laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum kecamatan ;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatatusahaan, kepegawaiaan, keuangan,kerumahtanggaan ,kerjasama,hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangan –undangan ;
5. Pengelolaaan barang milik /kekayaan Negara; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;.

Sedangkan tugas dari setiap sub bagian yang berada langsung di bawah Sekretariat adalah sebagai berikut :

### **a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas :**

- 1) Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- 2) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas,peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya
- 3) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasaranadi lingkungan kecamatan;
- 4) Melaksanakan urusan pengadaan ,penyimpanan ,pendistribusian dan inventarisasi barang barang inventaris;



- 5) Melaksanakan pengawasan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan kecamatan;
- 6) Melaksanakan urusan umum ,keprotokolan , hubungan masyarakat penyiapan rapat rapat dinas dan dokumentasi;
- 7) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ,administrasi kepegawaiaan ,administrasi kearsipan dan perpustakaan kecamatan;
- 8) Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaiaan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan /pelatihan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga tehnis dan fungsional;
- 10) Melakukan pengawasan ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b). **Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Mempunyai Tugas :**

- 1) Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan Kecamatan ;
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan ;
- 3) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan kecamatan ;
- 4) Menyusun laporan realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun ;
- 5) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan ;
- 6) Menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Kecamatan;
- 7) Menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Kecamatan ;

- 8) Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi serta mutasi asset ;
- 9) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan ;
2. Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya ;
3. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa / kelurahan;
4. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan ;
5. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa / kelurahan di wilayah kerjanya ;
6. Pelaksanaan fasilitasi penataan desa / kelurahan ;
7. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan desa ;
8. Pelaksanaan pengawasan dan pendataan atas tanah tanah Negara dari tanah asset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
9. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan ;
10. Pelaksanaan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan:

11. Pelaksanaan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara bebas di wilayah kerjanya ;
12. Pengoordinasian dan fasilitasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) ;
13. Pelaksanaan pengawasan ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ; dan;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan**

Seksi Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan ;

1. Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya ;
2. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan ;
3. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan ;
4. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan ;
5. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa / kelurahan ;
6. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan ;

7. Pengoordinasian penyelenggaraan lomba desa / kelurahan di wilayah kerjanya ;
8. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **5.Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.

Rincian tugas seksi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
3. Pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
4. Penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, peranan wanita, bantuan sosial serta kesejahteraan keluarga;
5. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat;
6. Pengoordinasian pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang social kemasyarakatan ;
7. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi social kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Keagamaan ;
8. Pengoordinasian dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan social ;

9. Pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perdagangan pasar desa, Usaha Ekonomi Produktif ;
10. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan dan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat ;
11. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

Seksi Ketentraman ,ketertiban dan perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
3. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Pengoordinasian pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
5. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
6. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kerja kecamatan serta upaya pemberantasan “penyakit masyarakat“;

8. Pengoordinasian pengawasan sarana dan prasarana fasilitasi pelayanan umum;
9. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **7.Seksi Pelayanan Umum**

Pelayanan umum mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan umum. Rincian tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan umum kepada masyarakat;
2. Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat Desa / Kelurahan;
4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses perizinan, dan pemanfaatan sarana pelayanan umum;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
7. Pengoordinasian rencana program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah lainnya di wilayah kecamatan;
8. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## ASPEK PENDUKUNG LAINNYA

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan. Tabel 2.1 menjelaskan kondisi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Sumber Harta berdasarkan kriteria pangkat/ golongan, sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan serta berdasarkan diklat yang pernah diikuti masing-masing dijelaskan pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.1**

### **Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan**

<b>No.</b>	<b>Pangkat</b>	<b>Golongan /Ruang</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pembina	IV / a	1 orang	
2.	Penata TK I	III/d	5 orang	
3.	Penata	III/c	4 orang	
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	- orang	
5.	Penata Muda	III/a	1.orang	
6.	Pengatur Tk.I	II/d	3 orang	
7.	Pengatur	II/c	- orang	
8.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	
9.		II/a	-	
10.	Pengatur Muda		-	
Jumlah			14 orang	

**Tabel 2.2**

### Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	Sarjana	10 orang	
2.	Sarjana Muda	-	
3.	SLTA	4 orang	
4.	SLTP	-	
5.	SD	-	
Jumlah		<b>14 orang</b>	

**Tabel 2.3**

### Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	PIM II / SPAMEN	-	
2.	PIM III / SPAMA	1 orang	
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	4 orang	
Jumlah		<b>5 orang</b>	

## D. Isu Strategis

### Permasalahan Utama

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:



**1. Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah**  
Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan yang terkait dengan hal-hal pelayanan Perangkat Daerah kecamatan, sebagai berikut:

- a) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan penyelenggaraan urusan pemerintah di mana peningkatan kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan;
- b) Penyediaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan kurang memadai;
- c) Cepatnya reformasi birokrasi, dan perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah.
- d) Adanya Refokusing Anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan maupun kebutuhan
- e) Adanya perubahan Regulasi di Tingkat Kabupaten.
- f) Belum semua struktural mendapatkan dukungan fasilitas kendaraan dinas/operasional.

#### **A. Permasalahan dan Hambatan**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

- a) Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terkait dengan: pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban pada tahun 2023 sangat terpengaruh dengan dampak pandemi; dan Regulasi yang berubah-ubah.
- b) Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- c) Kurangnya manajemen pembagian pekerjaan yang baik di Tingkat desa dalam pembagian tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Desa.

**1. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat daerah, diantaranya:

- a) Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;
- c) Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah;
- d) Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

### **B. Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis**

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, diantaranya:

- a. Perlunya penataan ulang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan untuk lebih optimal dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- b. Perubahan regulasi perencanaan dan penganggaran belum baik

### **E. Landasan Hukum**

1. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2 Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Sumber Harta Tengah Tahun 2021-2026

### **F. Sistematika Penulisan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Kantor Camat Sumber Harta selama tahun 2023, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut

: Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama, Landasan Hukum, Sistematika Penulisan;

Bab II Perencanaan menjelaskan tentang Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran. Bab IV Penutup menjelaskan Kesimpulan, Rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA)**

Rencana Strategis Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Sumber Harta yang merupakan perencanaan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplimentasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada. Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis di Kecamatan Sumber Harta sebagai dampak dari pembangunan, pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi serta berpengaruh adanya pasar bebas baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. Berangkat dari asumsi tersebut diatas, PD Kecamatan Sumber Harta menyadari sepenuhnya akan peran dimasa datang terutama lima tahun kedepan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan

tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kecamatan Sumber Harta Untuk menjalankan peran penting PD Kecamatan Sumber Harta tersebut, dan bertitik tolak dari analisa kondisi yang dimiliki yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

#### URAIAN SINGKAT VISI, MISI, TUJUAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

VISI RPJMD Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD adalah

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan ketika pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan cita-cita atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan. Visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam RPJMD tahun 2021-2026 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

#### **TERWUJUDNYA MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT ( MANTAB )**

Makna filosofis yang terkandung dari Visi tersebut adalah: Musi Rawas :Yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi Kabupaten Musi Rawas. Artinya Kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat yang berada dan tercatat dalam wilayah administrative Kabupaten Musi Rawas.

**MAJU** : Yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, social budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan

lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia (religius).

**MANDIRI** : adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkisambungan. Mandiri juga ditandai dengan kecukupan ruang untuk hidup dan berkembang, kecukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antar fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta sosial budaya.

**BERMARTABAT** :yaitu Masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalam nyaramah sebagai cirri khas Musi Rawas.

5.3 MISI RPJMD Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (enabling conditions) bagi pencapaian visi Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 “**Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)**”, maka diupayakan melalui 4 (empat )misi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Perwujudan misi-misi yang diuraikan diatas ditempuh melalui urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dalam setiap misi akan didukung oleh beberapa urusan pemerintahan daerah.

### ***1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sumber Harta***

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Kecamatan Sumber Harta yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas dalam lima tahun kedepan bertujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
2. Mewujudkan Pembangunan yang lebih meratan dan berkeadilan
3. Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang Asri dan Lestari
4. Mewujudkan Goog Governance

## 5. Mewujudkan Masyarakat Musi rawas yang Religius

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain

### .Tujuan-Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1.	<b>Tujuan 1.</b> Meningkatnya Kepuasan Penerima Layanan Kecamatan	<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2.	<b>Tujuan 2.</b> Terwujudnya Kecamatan Sumber Harta yang Akuntabel dan Profesional	<b>Sasaran 2</b> <b>Meningkatnya Kualitas tata Kelola Kecamatan Sumber Harta</b>

#### A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Taget realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

### **B.INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Tatget	Ralisasi	Capaian ( % )
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat	84	79,35	94,05%
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	Peerentase partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	87%	80	91%
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	92%	87	94%
4	Meningkatnya Impelementasi nilai-nilai	Persentase Desa dan kelurahan	100%	100	100%



	Pancasila,wawasan kebangsaan, keagamaan dan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia	yang bebas Konflik			
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan	Persentase Desa Yang tertib Administrasi	87%	80	91%
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kecamatan Sumber harta	1.Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sumber Harta	B(64,59)	61,90	95
		2.Indeks Profesional ASN Kecamatan Sumber Harta	55.17	49,12	89

### C.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

TABEL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat	84
2	MeCningkatnya Keberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	Peerentase partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	87

3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	92
4	Meningkatnya Impelementasi nilai-nilai Pancasila,wawasan kebangsaan, keagamaan dan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia	Persentase Desa dan kelurahan yang bebas Konflik	100%
		Persentase Desa Yang tertib Administrasi	87
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan	1.Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sumber Harta	B.( 64,59)
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kecamatan Sumber harta	2.Indeks Profesional ASN Kecamatan Sumber Harta	55,17

	<b>Program</b>	<b>Anggran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	1.737.188.558	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.212.800	APBDP
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	466.950.300	APBDP
4.	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	121.056.592	APBDP
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	14.900.000	APBDP

Desa

**JUMLAH**

**2.355.308.250**

**APBDP**

## **BAB. III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sumber Harta Merupakan Perwujudan Kewajiban Kecamatan Sumber Harta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sumber Harta tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan, pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja yang dipakai, rencana dan realisasinya serta pembobotan masing-masing kegiatan untuk menetapkan capaian indikator kinerja, dilampirkan dalam laporan ini dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Analisis capaian kinerja Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023 menetapkan 5 sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan pada table di bawah ini:

**Tabel 3.1**

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------	-----------	--------	-----------	---------

		kinerja			( % )
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat	84	79,35	94,05%
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	Peerentase partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	87%	80	91%
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	92%	87	94%
4	Meningkatnya Impelementasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, keagamaan dan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia	Persentase Desa dan kelurahan yang bebas Konflik	100%	100	100%
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan	Persentase Desa Yang tertib Administrasi	87%	80	91%

6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kecamatan Sumber harta	1.Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sumber Harta	B(64,59)	61,90	95%
		2.Indeks Profesional ASN Kecamatan Sumber Harta	55.17	49,12	89%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2023 terealisasi dengan baik. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta regulasi yang ada baik di tingkat pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi, maupun pemerintahan

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun yang Dilaporkan dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun yang dilaporkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2

## 2.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi
----	-------------------	-------------------	-----------

			2020	2021	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	72	79.53
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	-	75	80%
3.	Meningkatkannya Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Ketentraman dan Ketertiban	-	82	87%
4.	Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, Keagamaan dan Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia	Persentase Desa dan Kelurahan yang Bebas Konflik	-	100	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	-	75	80

**REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKAH MENENGAH**  
**TABEL.3.3**

6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Sumber Harta	1.Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sumber Harta	-	64.59	61.90
		2.Indeks Profesional ASN Kecamatan Sumber Harta	-	55.17	49.12

3.Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target  
 Jangkah menegah ( Renstra 2021 – 2026 )

$$\text{Target Naik : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran sampai dengan tahun 2023 dibandingkan  
 dengan target capaian indikator kinerja sasaran pada akhir RENSTRA  
 Tahun 2021-2026 dapat di lihat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat	84	79,35	94,05 %	90	88,16
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	Peerentase partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	87	80	91%	97	82.47
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	92	87	94%	98	88,77
4	Meningkatnya Impelementasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, keagamaan dan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia	Persentase Desa dan kelurahan yang bebas Konflik	100%	100	100%	100	100
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan	Persentase Desa Yang tertib Administrasi	87	80	91%	95	84,21



6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kecamatan Sumber harta	1.Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sumber Harta	B.( 64,59)	61,90	95		
		2.Indeks Profesional ASN Kecamatan Sumber Harta	55,17	49,12	89		

## **Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja**

### **Sasaran Serta Solusinya**

Analisis Per Indikator

#### 1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil dari pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang difokuskan terhadap pelayanan yang diberikan kecamatan Sumber Harta kepada masyarakat dengan capaian tidak mencapai target yang diinginkan dikarenakan ada beberapa faktor telah ditentukan yaitu target 84% dapat terealisasi 79,35% sehingga persentase capaian 94,05%. Ketidakberhasilan ini disebabkan karena pelayanan dikecamatan kurang maksimal dan Sumber Daya Manusianya (SDM) terbatas akan tetapi kedepan agar lebih maksimal lagi dan juga akan ditingkatkan kualitas sumber daya manusia serta perlu ditingkatkan juga anggaran agar pelayanan dikecamatan dapat lebih maksimal.

#### 2. Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan

Indikator Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan difokuskan pada realisasi anggaran Desa dan Kelurahan yang terserap, dimana pada Indikator ini dengan target 87% dapat terealisasi 80% dan dengan persentase capaian 91%, capaian keberhasilan ini

dapat tercapai didukung oleh Tingginya support swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga menjadi Maksimal.

### 3. Persentase Desa yang Tertib Administrasi

Pengukuran pada Indikator Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi ini difokuskan pada jumlah Desa dalam Kecamatan Selangit yang tertib administrasi dikurangi dengan desa yang belum tertib administrasi, dimana target yang telah ditentukan yaitu 87% dapat terealisasi 80% sehingga persentase capaian pada Indikator Kinerja ini sebesar 91%. Capaian keberhasilan ini didukung dengan faktor Sumber Daya Manusia Perangkat Desa sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang Pengadministrasian Desa serta Bimtek-Bimtek lainnya sehingga ke depan desa-desa yang belum memenuhi standar dalam hal pengadministrasian dapat melaksanakan administrasi dengan baik.

### 4. Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti.

Target dari Indikator Kinerja ini adalah 92%, dari target yang sudah ditentukan tersebut dapat terealisasi 87% sehingga Persentase capaian dari Indikator ini sebesar 91%. Pengukuran ini didasari oleh jumlah pengaduan dikurangi dengan jumlah yang dirindaklanjuti, dimana pada tahun 2023 ada 2 pangaduan dari masyarakat terkait Ketentraman dan ketentraman umum pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dan pengaduan tersebut dapat diselesaikan. Capaian ini dapat tercapai dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara pemerintahan Kecamatan Selangit dengan Masyarakat Desa.

5. Persentase Desa dan Kelurahan yang Bebas Konflik

Persentase desa dan kelurahan yang bebas konflik di Kecamatan Selangit pada tahun 2023 telah ditargetkan yaitu 100% dari jumlah desa dan kelurahan, target tersebut ditetapkan karena adanya beberapa desa dalam Kecamatan Selangit akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, hal tersebut dikhawatirkan akan memicu terjadinya konflik, akan tetapi dari target yang sudah ditetapkan dapat terealisasi 100% dan capaian pada indikator ini adalah 100%. Keberhasilan capaian ini didukung oleh faktor adanya kerjasama antar stochorder yang ada di Kecamatan Sumber Harta.

6. a. Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sumber Harta

Target nilai SAKIP Kecamatan Sumber Harta yaitu 70%, dan hanya dapat terealisasi 61,90%, sehingga capaian pada indikator kinerja ini hanya mencapai 95% dan Mendapatkan Predikat B. Ada beberapa kendala sehingga realisasi tidak mencapai target yaitu diantaranya adalah adanya pengurangan anggaran atau refocusing sebesar 10% pada tahun 2023 sehingga beberapa Program dan kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal, dan bahkan ada 2 Program dan kegiatan yang sama sekali tidak terlaksana.

b. Indek Profesionalitas ASN Kecamatan Sumber Harta

Indek Profesionalitas ASN Kecamatan Sumber Harta pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 65%, akan tetapi hanya terealisasi 49,12%, sehingga nilai persentase capaian pada indikator ini hanyalah 89% sehingga capaiannya sangat rendah. Faktor tidak tercapainya Indek Profesionalitas ASN

## EFESISENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel.3.4

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	%	Tingkat
----	-------------------	-----------	---------	---------	---	---------

Kecamatan Sumber Harta selain karena keterbatasan anggaran juga disebabkan oleh masih kurang maksimalnya Sumber Daya Manusia yang ada, Kurangnya Mengikuti Bimtek atau pelatihan yang telah di diadakan Pemerintah kabupaten setempat serta masih rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai. Maka dari itu untuk tahun yang akan datang sangat perlu ditingkatkan anggarannya untuk peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis

		<b>Kinerja</b>	<b>Kinerja (&gt;=100)</b>		<b>Penyerapan Anggaran</b>	<b>Efisiensi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat	94,05%	penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	0
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	Peerentase partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	91%	Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	97	3%
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	94%	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0%	0
4	Meningkatnya Impelementasi nilai-nilai Pancasila,wawasan kebangsaan, keagamaan dan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia	Persentase Desa dan kelurahan yang bebas Konflik	100%	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100%
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan	Persentase Desa Yang tertib Administrasi	91%	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kecamatan Sumber harta	1.Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sumber Harta	95	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61,9	95

		2.Indeks Profesional ASN Kecamatan Sumber Harta	89		49,12	89
--	--	---	----	--	-------	----

## 7. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Sasaran Serta Solusinya

### Analisis Per Indikator

#### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil dari pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang difokuskan terhadap pelayanan yang diberikan kecamatan Sumber Harta kepada masyarakat dengan capaian tidak mencapai target yang diinginkan dikarenakan ada beberapa faktor telah ditentukan yaitu target 84% dapat terealisasi 79,35% sehingga persentase capaian 94,46%. Ketidakberhasilan ini disebabkan karena pelayanan dikecamatan kurang maksimal dan Sumber Daya Manusianya (SDM) terbatas akan tetapi kedepan agar lebih maksimal lagi dan juga akan ditingkatkan kualitas sumber daya manusia serta perlu ditingkatkan juga anggaran agar pelayanan dikecamatan dapat lebih maksimal.

#### 2. Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan

Indikator Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan difokuskan pada realisasi anggaran Desa dan Kelurahan yang terserap, dimana pada Indikator ini dengan target 87% dapat terealisasi 80% dan dengan persentase capaian 91,95%, capaian keberhasilan ini dapat tercapai didukung oleh Tingginya support swadaya dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga menjadi Maksimal.

### 3. Persentase Desa yang Tertib Administrasi

Pengukuran pada Indikator Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi ini difokuskan pada jumlah Desa dalam Kecamatan Sumber harta yang tertib administrasi dikurangi dengan desa yang belum tertib administrasi, dimana target yang telah ditentukan yaitu 87% dapat terealisasi 80% sehingga persentase capaian pada Indikator Kinerja ini sebesar 91,95%. Capaian keberhasilan ini didukung dengan faktor Sumber Daya Manusia Perangkat Desa sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang Pengadministrasian Desa serta Bimtek-Bimtek lainnya sehingga ke depan desa-desa yang belum memenuhi standar dalam hal pengadministrasian dapat melaksanakan administrasi dengan baik.

### 4. Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti.

Target dari Indikator Kinerja ini adalah 92%, dari target yang sudah ditentukan tersebut dapat terealisasi 87% sehingga Persentase capaian dari Indikator ini sebesar 94,56%. Pengukuran ini didasari oleh jumlah pengaduan dikurangi dengan jumlah yang dirindaklanjuti, dimana pada tahun 2023 ada 2 pengaduan dari masyarakat terkait Ketentraman dan ketentraman umum pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dan pengaduan tersebut dapat diselesaikan. Capaian ini dapat tercapai dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara pemerintahan Kecamatan Sumber Harta dengan Masyarakat Desa.

### 5. Persentase Desa dan Kelurahan yang Bebas Konflik

Persentase desa dan kelurahan yang bebas konflik di Kecamatan Sumber Harta pada tahun 2023 telah ditargetkan yaitu 100% dari jumlah desa dan kelurahan, target tersebut ditetapkan karena adanya beberapa desa dalam Kecamatan Selangit akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, hal tersebut dikhawatirkan akan memicu terjadinya konflik, akan tetapi dari target yang sudah ditetapkan dapat terealisasi 100% dan capaian pada indikator ini adalah 100%. Keberhasilan capaian ini didukung oleh faktor adanya kerjasama antar stochorder yang ada di Kecamatan Sumber Harta

#### 6. a. Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sumber Harta

Target nilai SAKIP Kecamatan Sumber Harta yaitu 64,59%, dan hanya dapat terealisasi 61,90%, sehingga capaian pada indikator kinerja ini hanya mencapai 95% dan Mendapatkan Predikat B. Ada beberapa kendala sehingga realisasi tidak mencapai target yaitu diantaranya adalah adanya pengurangan anggaran atau refocusing sebesar 10% pada tahun 2023 sehingga beberapa Program dan kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal, dan bahkan ada 2 Program dan kegiatan yang sama sekali tidak terlaksana.

#### b. Indek Profesionalitas ASN Kecamatan Sumber Harta

Indek Profesionalitas ASN Kecamatan Sumber Harta pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 55,17%, akan tetapi hanya terealisasi 49,12%, sehingga nilai persentase capaian pada indikator ini hanyalah 89% sehingga capaiannya sangat rendah. Faktor tidak tercapainya Indek Profesionalitas ASN Kecamatan Sumber harta selain karena keterbatasan anggaran juga disebabkan oleh masih kurang maksimalnya Sumber Daya Manusia yang ada, Kurangnya Mengikuti Bimtek atau pelatihan yang telah di diadakan Pemerintah



kabupaten setempat serta masih rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai. Maka dari itu untuk tahun yang akan datang sangat perlu ditingkatkan anggarannya untuk peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis.

**Table 3.4**

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strate</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja (&gt;=100</b>	<b>Program</b>	<b>% Penyerapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
<b>1</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	94,46%	penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>2</b>	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Pembangunan	91,95	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<b>97%</b>	<b>3%</b>
<b>3</b>	Meningkatkannya Ketentraman	Persentase Pengaduan	94,56	Koordinasi	<b>0</b>	<b>0</b>

	dan Ketertiban	Masyarakat Terkait Ketentraman dan Ketertiban		Ketentraman dan Ketertiban Umum		
<b>4</b>	Meningkatnya Implementasi Nilai nilai Pancasila, wawasan Kebangsaan, Keagamaan Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia	Persentase Desa dan Kelurahan yang Bebas Konflik	100	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	100	100
<b>5</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administratif	91,95	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0
<b>6</b>	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Sumber Harta	1.Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sumber Harta	64,59		61.90	95
		2.Indeks Profesional ASN	55,17		49,12	89

		Kecamatan				
		Sumber Harta				
Rata-rata program/kegiatan yang						
Menunjang keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja					96%	2%

## 7. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.5

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat	Program /Kegiatan tersebut Menjadi penunjang
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		keberhasilan dikarenakan dukungna dengan anggaran yg ada
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 kali Pelaksanaan
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peerentase partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	Program /Kegiatan tersebut Menjadi penunjang keberhasilan dikarenakan dukungna dengan anggaran yg ada
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1 kelurahan

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	program ini tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pengurangan anggaran ( Revochusing )
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1 posko
Meningkatnya Implementasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, keagamaan dan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa dan kelurahan yang bebas Konflik	Program /Kegiatan tersebut Menjadi penunjang keberhasilan dikarenakan dukungna dengan anggaran yg ada
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		1 kali Pelaksanaan
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		

Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan dan Pebgawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang tertib Administrasi	Faktor yang menunjang atas kegagalan Program ini dikarenakan adanya refocusing anggaran sebesar 10% dan juga Program dan kegiatan ini diadakan ditahun berikutnya
	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		4 desa
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kecamatan Sumber harta	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sumber Harta 2.Indeks Profesional ASN Kecamatan Sumber Harta	Program /Kegiatan tersebut Menjadi penunjang keberhasilan dikarenakan dukungna dengan anggaran yg ada
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban Keuangan	1 Dokumen
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban Keuangan	3 Jenis
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya Jasa Administrasi Perkantoran	1 Jenis
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	5 Jenis

Dari pencapaian target kinerja pada tahun 2023 maka dapat dinilai bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang tidak menunjang dalam keberhasilan pencapaian target karena rata-rata dari keseluruhan capaian kinerja berdasarkan capaian realisasi capaian kinerja sebesar 89%, dapat dijelaskan bahwa dari 6 target capaian kinerja ada 5 indikator capaian kinerja yang mendapatkan diatas 85%, dan ada 1 target indikator kinerja capaian dibawah 60,%

Dapat diartikan bahwa tidak seluruh program dan kegiatan Kantor Camat Sumber Harta sebagai penunjang keberhasilan capaian kinerja . pada tahun mendatang akan ditingkatkan dan akan mengusulkan program dan kegiatan yang dapat mewujudkan capaian target serta akan mengusulkan beberapa program dan kegiatan yang dapat mengakomodir keinginan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan Sumber Harta.

A.7.1 Adapun Analisis Program Penunjang Keberhasilan Kecamatan Sumber Harta ialah

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja diupayakan alternatif program penunjang keberhasilannya, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Desa dan Kelurahan di

Kecamatan Sumber Harta melalui pendidikan dan pelatihan.

- a. Membuat jadwal waktu pelaksanaan kegiatan (*Time Schedule*);
- b. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan kepada masyarakat;
- c. Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman.

2. Dalam hal peningkatan sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas pemanfaatannya, diupayakan beberapa strategi antara lain :

- a. Memenuhi sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu, dan hasil sesuai dengan target kerja;
  - b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan fasilitas yang telah tersedia.
3. Dalam hal peningkatan koordinasi yang belum optimal antara Kantor Camat Sumber Harta dengan instansi terkait diupayakan strategi yaitu dengan menjalin koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait di lingkungan Kantor Camat Sumber Harta Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
4. Dalam hal memberdayakan masyarakat dalam pembangunan daerah diupayakan beberapa strategi yakni mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai aspek antara lain dalam kegiatan keagamaan, olahraga, perekonomian, pemerintahan dan perencanaan pembangunan.

## **A. REALISASI ANGGARAN**

Anggaran tahun 2023 Kecamatan Sumber Harta sebesar RP. 2.216.469.840,- dengan 6 Program, 11 kegiatan, dan 18 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.125.787.689,- Atau apabila dipersentasekan adalah sebesar 95,91%. Adapun lebih terperinci maka dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini





## REALISASI KEUANGAN YANG Mendukung Pencapaian Kinerja

Tabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat	84	79,4	94,05%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	49.052.750	49.052.750	100%
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	Peerentase partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	87	80	91%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	241.647.000	239.107.600	97%
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	92	87	94%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	48.560.600	-	0%

4	Meningkatnya Impelementasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, keagamaan dan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia	Persentase Desa dan kelurahan yang bebas Konflik	100%	100	100%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	89.214.100	89.214.100	100%
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan	Persentase Desa Yang tertib Administrasi	87	80	91%	Program Pembinaan dan Pebgawasan Pemerintahan Desa	14.998.800	-	0%
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kecamatan Sumber harta	1.Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sumber Harta	B.(64,59)	61,9	95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.990.176.330	1.748.413.239	96,56%

	2. Indeks Profesional ASN Kecamatan Sumber Harta	55	49,1	89				
--	--	----	------	----	--	--	--	--

## B. Realisasi Anggaran

(pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja)

### REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2023

Tabel

No	Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Perubahan)	Penyerapan		Keuangan				
			Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Narasi	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota								
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.523.620.340	1.447.589.573						100%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.488.622.040	1.412.731.573	94,99%	Terbayarnya gaji dan Tunjangan	Orang	18 Orang	18 Orang	100%

					ASN				
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	34.998.300	34.858.000	99,61%	Terbayarnya Honorarium Administrasi Keuangan	Orang	3 Orang	3 Orang	100%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.630.600	88.754.800						100%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor	7.410.000	7.410.000	100%	Tersedianya Komponen kantor	Jenis	2 jenis	2 jenis	100%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.738.600	24.738.600	100%	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	3 jenis	3 jenis	100%
8	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	19.000.000	10.670.000	56,16%	Tersedianya Koran dan majalah	Koran / majalah	koran / majalah	koran / majalah	100%
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.482.000	45.936.200	98,83%	Jumlah rapat rapat koordinasi	Tahun	1 tahun	1 tahun	100%

10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	186.429.900	184.459.076						100%
11	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	5.229.900	3.259.076	62,32%	Terbayarnya Listrik kantor	Rekening	Rekening	Rekening	100%
12	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	181.200.000	181.200.000	100%	Terbayarnya Honorarium Non ASN	Orang	11 Orang	11 Orang	100%
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.875.150	27.609.790						0%
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	28.875.150	27.609.790	98%	Terbayarnya pajak kendaraan Dinas	Unit	1 unit	1 unit	100%
15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								

16	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.212.800	15.212.800						0%
17	Koordinasi /sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	15.212.800	15.212.800	100%	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Kali	1 Kali	1 Kali	100%
18	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan	33.839.950	33.839.950						0%

19	Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.839.950	33.839.950	100%	Terlaksananya Kegiatan PKK	Tahun	1 tahun	1 tahun	100%
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								0%
21	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	241.647.000	239.107.600						
22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	241.647.000	239.107.600	95%	Terbayarnya Oprasional Kelurahan	Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%
23	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
24	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-							



25	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			0%		Posko	1 Posko	1 Posko	0%
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Desa	89.214.100	89.214.100						100%

28	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75.269.500	75.269.500	100%	Terlaksananya HUT RI di Kecamatan	kali	1 kali pelaksanaan	1 kali pelaksanaan	100%
29	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	13.944.600	13.944.600	100%	Terbinanya Santri qori dan qoriah	Kali Pelaksanaan	Kali Pelaksanaan	Kali Pelaksanaan	100%
30	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA								

31	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
32	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			0%	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	Desa/Kelurahan	4 Desa	4 Desa	0%

## PENGUKURAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat	84	79,35	94,05%
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan	87	80	91%
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	92	87	94%
4	Meningkatnya Implementasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, keagamaan dan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia	Persentase Desa dan kelurahan yang bebas Konflik	100%	100	100%
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan	Persentase Desa Yang tertib Administrasi	87	80	91%
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kecamatan Sumber harta	1.Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sumber Harta	B.( 64,59)	61,9	95
		2.Indeks Profesional ASN Kecamatan Sumber Harta	55,17	49,12	89

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas tergolong baik. Namun demikian, ada beberapa indikator walaupun pencapaiannya sudah baik namun masih perlu ditingkatkan seperti prosentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belum tercapainya target yang ditetapkan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya koordinasi antar sub unit dalam organisasi dan antara organisasi dengan PD terkait.
2. Belum adanya sistem informasi (basis data) sebagai dasar dari perencanaan yang efektif.
3. Lemahnya monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan (*follow up*).

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, maka beberapa solusi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat.

Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Demikian, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi*

*Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023*, kami buat sebagai Pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja kami selaku Camat Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan kinerja kami sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Sumber Harta Tahun 2021 – 2026

Dengan tersusunnya Laporan ini, diharapkan Kinerja Kecamatan Sumber Harta akan terus menjadi lebih baik secara berkesinambungan, sehingga pemanfaatan potensi daerah Kabupaten Musi Rawas dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bagi kepentingan masyarakat.